

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS
AUDITOR EKSTERNAL TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (ETR)
(STUDI PADA BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2010-2014)**

Novi Anggraini, Prasetyono, Nurul Kompyurini*
Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
Email: prasetyono_akt@trunojoyo.ac.id*

ABSTRACT

The aim of this research to examine the affect to Corporate Governance Structure consisting of Independen Commissioner, Audit Committee and the Institutional Shareholders and Quality of the External Auditor on the Effective Tax Rate. Control variable this research are size, leverage, return on assets and capital intencity ratio. This research is an empirical research with the purpose of sampling techniques in data collection. Secondary data obtained from financial statements that have been privatized government enterprises and listing on the Stock Exchange during the year 2010 to the year 2014. Multiple regression analysis was conducted using SPSS version 21. The test result showed that: (1) The proportion of independent commissioners show any significant effects on effective tax rate, (2) The size of audit committee don't show any significant effects on effective tax rate, (3) Inisitutional shareholders don't show any significant effects on effective tax rate, (4) Quality of the External Auditor don't show any significant effects on effective tax rate.

Keywords: *effective tax rate, corporate governance, quality of the external auditor, government companies.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Struktur *Corporate Governance* yang terdiri dari: Komisaris Independen, Komite Audit dan *Investor* Institusional serta Kualitas Auditor Eksternal terhadap *Effective Tax Rate*. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah *size, leverage, return on assets* dan *capital intencity ratio*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* dalam pengumpulan data. Data diperoleh dari data sekunder laporan keuangan perusahaan BUMN yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014. Analisis dilakukan dengan regresi berganda menggunakan program SPSS versi 21. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*, (2) Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*, (3) *Investor* institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*, (4) Kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Kata Kunci: *Effective tax rate, corporate governance, kualitas auditor eksternal, Perusahaan Pemerintah.*

PENDAHULUAN

Pada sebuah perusahaan yang didirikan tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang muncul, permasalahan tersebut berupa konflik tujuan antara investor dan

manajer perusahaan, kesulitan dari pemberi wewenang untuk melakukan verifikasi pekerjaan manajer lalu masalah pembagian resiko yang muncul karena perilaku yang berbeda antara investor dan manajer terhadap resiko. Ikhsan dan Suprasto (2008: 76) menjelaskan bahwa salah satu teori yang dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah teori keagenan (*agency theory*).

Berawal dari permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, di dalam agensi teori memiliki cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kontrak dalam sebuah perusahaan yaitu melalui tata kelola perusahaan atau *corporate governance*. Konsep *corporate governance* juga merupakan jawaban kinerja dari teori agensi atas ketidakpuasan para ilmuwan keuangan dalam tataran empirik (Sutedi, 2011). Menurut Jansen (1983) dalam Ikhsan (2008: 76) dengan *corporate governance* ini sebuah perusahaan dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen yaitu sebuah perilaku yang mengeksploitasi peluang keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2006) yang diterjemahkan dari *cadbury report* oleh Suartini (2013) menyebutkan bahwa *Corporate governance* merupakan perangkat peraturan yang dipergunakan dalam menjelaskan peranan, perilaku dan hubungan dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus atau pengelola perusahaan, pemegang saham, para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya.

Dengan menerapkan *corporate governance* perusahaan juga dapat mengambil keputusan yang efektif, efisien dan tepat mengenai penentuan besaran tarif pajak efektif perusahaan. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif perusahaan dapat dilakukan melalui tarif pajak efektif (*effective tax rate/ ETR*).

Pada perusahaan pemerintah (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagian besar pemegang sahamnya adalah dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki hak untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Pemegang saham mayoritas diindikasikan terlibat dalam penetapan besaran *effective tax rate* (ETR) perusahaan dan pada perusahaan pemerintah terdapat indikasi konflik antara pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham mayoritas dalam hal kebijakan penetapan besaran *effective tax rate* (ETR) tersebut (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Studi mengenai *corporate governance* dan *effective tax rate* (ETR) telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun kebanyakan menggunakan ETR sebagai proksi *tax avoidance*, antara lain: Pohan (2009) menemukan bahwa untuk pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen yaitu kepemilikan institusi dan biaya pajak yang ditunda tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang telah menganalisis ETR sebagai proksi besar kecilnya pajak yang dibayar perusahaan yaitu Hanum dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan *investor* institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) serta Boussaidi dan Hamed (2015). Pada penelitian ini akan diuji variabel independen berupa struktur dari *corporate governance* (komisaris independen, komite audit dan *investor* institusional) dan kualitas auditor eksternal yang dapat dilihat dari besarnya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan pengauditan, berstandar pada apakah KAP bekerja sama dengan *big four* atau tidak. Sedangkan variabel dependennya adalah *effective tax rate* atau tarif pajak efektif yang menjadi proksi besar kecilnya pembayaran pajak yang dihitung sendiri oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh komisaris independen, komite audit, investor institusional dan kualitas auditor eksternal terhadap *effective tax rate* (ETR). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin menguji pengaruh komisaris independen, komite audit, investor institusional dan kualitas auditor eksternal terhadap *effective tax rate*.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi yaitu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Adanya benturan kepentingan antara keduanya inilah yang memicu munculnya *agency theory*.

Corporate Governance

The Indonesian Institute for Corporate Governance (2012) mengartikan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup panjang (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) terdapat 5 prinsip yang dikemukakan yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut sangat diperlukan dalam penerapan GCG dikarenakan sangat berkaitan dengan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan.

Struktur *corporate governance* adalah organ-organ yang ada dalam perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan *corporate governance*. Struktur *corporate governance* meliputi organ utama perusahaan yaitu pemegang saham/RUPS, dewan komisaris dan direksi serta organ-organ pendukung *corporate governance* lainnya yaitu komite-komite yang ada dalam perusahaan.

Parker *et.al* (2005) dalam Andika (2007) menerjemahkan bahwa terdapat struktur-struktur penting dalam *Corporate Governance*, diantaranya adalah pergantian kepemimpinan perusahaan, kepemilikan saham oleh pihak internal atau manajerial dan pihak eksternal (*Blockholder*) yang minimal harus memiliki 5% dari saham yang beredar, serta karakteristik komite audit, dimana didalamnya terdapat faktor ada tidaknya komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.

Berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada BUMN, organ-organ didalam *Good Corporate Governance* adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi untuk Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi untuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Kualitas Auditor Eksternal

Auditor eksternal ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mendapatkan ijin usaha berdasarkan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik).

Untuk menentukan ukuran kualitas dari auditor dapat diketahui melalui besarnya perusahaan audit yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan tahunan suatu perusahaan yang berstandar pada apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) bekerja sama dengan KAP kelompok *Big 8/6/5/4* atau tidak (Tuanakotta, 2011: 235).

Effective Tax Rate (ETR)

Richardson dan Lanis (2007) Hanum dan Zulaikha (2013), menjelaskan bahwa tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan tarif pajak efektif perusahaan dapat mengukur beban pajak yang sebenarnya, perusahaan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya harus dibayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak marginalnya.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan proksi komisaris independen, komite audit dan investor institusional untuk mengukur struktur *corporate governance* dikarenakan ketiga proksi tersebut merupakan organ perusahaan yang memiliki hubungan dalam pelaksanaan *corporate governance* perusahaan serta menandakan kualitas dari *corporate governance* perusahaan. Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan proksi kualitas auditor eksternal yang merupakan salah satu konsep yang menjadi subjek dari beberapa studi mengenai tata kelola perusahaan.

Selain hal diatas, alasan dipilihnya proksi-proksi tersebut dikarenakan telah ditemukannya hubungan empiris dengan *effective tax rate* atau tarif pajak efektif pada penelitian sebelumnya. Hanum dan Zulaikha (2013) yang bertujuan menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit dan pemegang saham institusional terhadap *effective tax rate* perusahaan BUMN yang telah *listing* di BEI. Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris dengan teknik *purposive sampling* dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitiannya menemukan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan *investor* institusional tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Boussaidi dan Hamed (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh dari mekanisme *corporate governance* terhadap *agresivitas perusahaan* yang telah *listing* di Tunisia. Penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif yang hasil regresi dari penelitiannya adalah perbedaan gender pada dewan direksi, manajerial dan konsentrasi pemilik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktifitas *tax aggressiveness* perusahaan, ragam dewan dan peran kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dengan tarif pajak efektif sementara peningkatan konsentrasi kepemilikan cenderung berpengaruh negatif, sedangkan penelitian ini juga tidak menemukan efek yang signifikan dari adanya ukuran perusahaan dan auditor eksternal terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*

Menurut Pedoman Umum Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Berdasarkan dengan itu, keberadaan komisaris independen dapat mengatasi masalah keagenan dan mencerminkan penerapan *corporate governance* dalam perusahaan. Artinya, keberadaan komisaris independen dapat

mempengaruhi keputusan perusahaan dalam penentuan kebijakan tarif pajak efektif perusahaan yang dihitung melalui *effective tax rate*.

Sari dan Martani (2010) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Sabli dan Noor (2012) menyimpulkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga mengarah ke hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate* (ETR).

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*

Komite audit adalah komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan penelaahan atas laporan keuangan untuk selanjutnya dikeluarkan perusahaan. Proses penelaahan atas laporan keuangan perusahaan dalam tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip pengawasan atas kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa peningkatan dari jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan dan akan lebih efektif termasuk juga berkaitan dengan besaran tarif efektif pajak perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Komite audit berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate* (ETR).

Pengaruh Ukuran *Investor* Institusional terhadap *Effective Tax Rate*

Investor institusional memiliki kendali terhadap pengawasan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba yang sesuai dengan aturan yang berlaku, karena ketaatan akan aturan yang berlaku yang dilihat oleh *investor* institusional. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat indikasi *investor* institusional mempunyai andil dalam penetapan kebijakan yang terkait tingkat pajak efektif

Lim (2011) dalam Hanum dan Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari *investor* institusi akan membantu untuk meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham. Sari (2014) menunjukkan bahwa *investor* institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Investor* Institusional berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate* (ETR).

Pengaruh Kualitas auditor eksternal terhadap *Effective Tax Rate*

Audit atas laporan keuangan perusahaan memiliki prinsip akuntabilitas yaitu perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar melalui pengawasan yang salah satunya pengawasan dari eksternal auditor.

Richardson (2013) dalam Boussaidi dan Hamed (2015) menunjukkan bahwa jika perusahaan menggunakan auditor BIG 4 kurang memungkinkan terhadap tujuan agresivitas pajak. Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa terbukti terdapat pengaruh yang signifikan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin

dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012). Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Ukuran kualitas auditor eksternal berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate* (ETR).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah riset yang didasarkan pada data kuantitatif di mana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (Suliyanto, 2009: 12).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yang merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Penetapan Sampel	Jml
1.	Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014	20
2.	Perusahaan BUMN yang tidak mengeluarkan <i>annual report</i> dan laporan keuangan yang lengkap selama tahun 2010-2014	(1)
3.	Perusahaan BUMN yang tidak menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya selama tahun 2010-2014	(3)
4.	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	16
5.	Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (16 x 5 tahun)	80

Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi variabel bebas (Suliyanto, 2009: 12). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah *effective tax rate* (ETR) yang merupakan besaran pajak yang dibayarkan perusahaan. ETR diukur menggunakan proksi model Lanis dan Richardson (2012), dengan rumus beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan. ETR₁ menggambarkan presentase dari total beban pajak penghasilan perusahaan yang dibayarkan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan.

Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya variabel yang lain (Suliyanto, 2009: 12). Dalam penelitian ini variabel independen adalah struktur *corporate governance* (komisaris independen, komite audit dan *investor* institusional) serta kualitas auditor eksternal.

1. Komisaris Independen

Komisaris adalah pribadi-pribadi yang dipercaya oleh pemilik perusahaan untuk mewakilinya dalam mengawasi jalannya kepengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi (Supangkat, 2005: 169). Keberadaan komisaris independen berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Variabel ini diukur dengan menggunakan proksi yang merupakan replikasi dari Hanum dan Zulaikha (2013) yaitu jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan.

2. Komite Audit

Komite audit merupakan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Proksi komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

3. Investor Institusional

Venkatachalam (1998) dalam Komsiah (205) dalam Pohan (2009) menyatakan bahwa investor institusional sering disebut sebagai investor canggih yang aktif dalam melakukan monitoring terhadap manajemen karena pada umumnya memiliki saham untuk jangka panjang. Apabila dalam suatu perusahaan memiliki lebih dari satu pemegang saham institusi maka kepemilikan sahamnya diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan institusi. Variabel ini dihitung dengan rumus yang mereplikasi penelitian Hanum dan Zulaikha (2013) dengan membagi jumlah saham institusi terhadap jumlah saham beredar perusahaan.

4. Kualitas Auditor Eksternal.

Untuk menentukan ukuran kualitas dari auditor dapat diketahui melalui besarnya perusahaan audit yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan tahunan suatu perusahaan yang berstandar pada apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) bekerja sama dengan KAP kelompok *Big 8/6/5/4* atau tidak (Tuanakotta, 2011: 235). Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012). Penilaian yang dilakukan untuk mengukur kualitas auditor eksternal menggunakan variabel *dummy* seperti penelitian yang dilakukan oleh Hamed (2015). Bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* maka akan diberikan nilai 1, sedangkan jika perusahaan tidak diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* maka akan diberikan nilai 0.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang sebelumnya perlu dilakukan statistik deskriptif uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoloniaritas, uji autokorelasi, Uji heteroskedastisitas) serta uji hipotesis (meliputi koefisien determinasi, uji F dan uji statistik t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Bagian ini akan menjelaskan statistik deskriptif dari seluruh variabel yang terdiri dari variabel independen, variabel kontrol dan variabel dependen.

Tabel 2. Ringkasan Statistik Deskriptif Eliminasi Data
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IND	77	,20	,60	,4190	,09695
KA	77	2,00	7,00	4,0130	1,17533
INS	77	,38	,99	,8319	,17333
EKSAUD	77	,00	1,00	,5584	,49983
SIZE	77	8,90	14,87	13,2101	1,04247
LEV	77	,01	10,02	3,1297	3,07359
ROA	77	,01	,27	,0710	,06136
CIR	77	,00	,73	,1735	,21175
ETR	77	,06	,84	,2964	,11906
Valid N (listwise)	56				

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data masing-masing variabel adalah 77 data karena pada penelitian ini mengandung data yang outlier sehingga membutuhkan *screening* data. Dalam penelitian ini, eliminasi dilakukan pada seluruh variabel yang memiliki nilai outlier pada data penelitian. Eliminasi data dilakukan pada seluruh variabel yang masing-masing variabel dieleminasi sebanyak 3 data yang dilakukan pada sampel penelitian perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode penelitian tahun 2010-2014.

Dati tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel kecuali variabel kontrol *capital intencity ratio* memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidentifikasi bahwa standar *error* dari variabel tersebut kecil (Ghozali, 2006:19).

Hasil Uji Asumsi Klasik

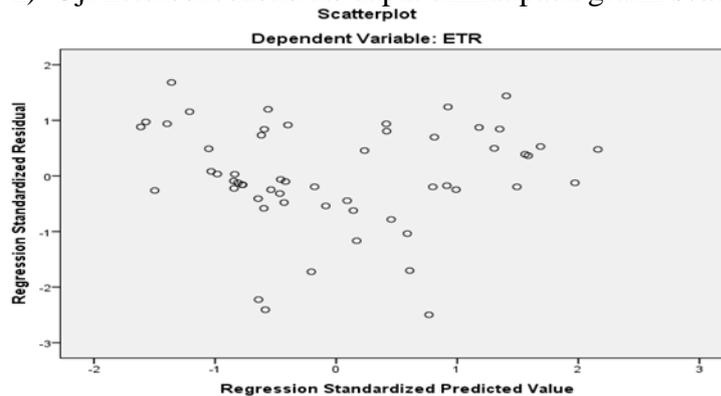
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda, untuk itu data harus memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Ringkasan Uji Asumsi Klasik Eliminasi Data

Variabel	Tolerance	VIF
IND	0,600	1,668
KA	0,771	1,296
INS	0,775	1,290
EKSAUD	0,361	2,770
SIZE	0,724	1,382
LEV	0,289	3,458

ROA	0,405	2,4469
CIR	0,464	2,153
Uji Kolmogorof-Smirnov Test nilai Sig 0,388. Uji Run Test nilai Sig 0,112		

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai signifikansi statistik sejumlah 0.388 menyatakan bahwa persamaan regresi berdistribusi normal yaitu nilai signifikansi $0.388 > 0.05$ dan dapat digunakan. Uji multikolinearitas terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai $VIF < 10$, maka model regresi ini terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2006: 92). Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas Eliminasi Data

Dapat diketahui bahwa *output* diagram pencar residual tidak membentuk pola tertentu (gambar 1). Uji Autokorelasi menggunakan uji *run test* yang menunjukkan bahwa Nilai *test* dari uji *Run Test* adalah 0,00097 dengan probabilitas atau sig sebesar 0,112 signifikansi pada 0,05 ($0,112 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak mengandung problem autokorelasi antar nilai residualnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis penelitian ini meliputi koefisien R^2 , uji F dan uji statistik t.

Tabel 4. Hasil Uji R^2 , Uji F dan Uji t

Variabel	Uji t Model 1			Uji t Model 2		
	Nilai Koefisien	t-Value	P-Value	Nilai Koefisien	t-Value	P-Value
IND	-0,174	-1,044	0,301	-0,375	-2,789	0,008
KA	-0,016	-1,181	0,242	-0,013	-1,310	0,197
INS	-0,019	-0,213	0,832	-0,076	-1,152	0,255
EKSAUD	-0,076	-2,068	0,043	-0,048	-1,383	0,173
SIZE				-0,007	-510	0,613
LEV				0,009	1,445	0,155
ROA				0,000	-0,002	0,999
CIR				0,064	-,922	0,361

- Model 1= Uji R^2 nilai $R= 0,462$, Adjusted R Square= 0,162,
Uji F nilai $F= 4,143$, Sig.=0,005
- Model 2= Uji R^2 nilai $R= 0,710$, Adjusted R Square= 0,419
Uji F nilai $F= 5,957$, Sig.= 0,000

Model 1 adalah model yang menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan model 2 adalah model yang menguji pengaruh variabel independen serta variabel kontrol terhadap variabel dependen.

Dapat dilihat bahwa nilai R^2 dari kedua model tersebut lebih besar model kedua, artinya variabel kontrol juga mempengaruhi nilai-nilai output dari model serta untuk presentase sumbangan penuh model yang baik digunakan adalah model kedua.

Dapat dilihat angka-angka pada model kedua memiliki perbedaan dengan angka pada model pertama uji signifikansi simultan, bahwa adanya variabel kontrol mempengaruhi nilai dari angka tersebut. Dari kedua model uji signifikansi simultan (F) dapat diketahui model kedua adalah model yang lebih baik untuk mengetahui pengaruh simultan atau bersama-sama yaitu antara variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen. Hal tersebut dikarenakan dari hasil olah statistik SPSS 21 menunjukkan model kedua memiliki nilai F yang lebih besar dari model pertama, serta memiliki nilai Sig. yang lebih kecil dari pada model pertama.

Jika dilihat hasil uji parsial antara model yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta model yang menguji pengaruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen angka-angka outputnya memiliki perbedaan. Bahwa adanya variabel kontrol juga mempengaruhi angka-angka dari konstanta, nilai beta, standar error, nilai t hingga angka signifikansi pada masing-masing variabel.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan untuk variabel komite audit, investor institusional, kualitas auditor eksternal, *size*, *leverage*, *return on assets* (ROA) dan *capital intencity ratio* (CIR) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *effective tax rate* (ETR) karena memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Maka diartikan hipotesis yang diterima adalah H_1 yaitu bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate* perusahaan. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah H_2 , H_3 dan H_4 .

Pengaruh Ukuran Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate*

Untuk pengujian secara parsial diperoleh t hitung untuk variabel ukuran komisaris independen sebesar -2,789 dengan signifikansi 0,008 sehingga hipotesis H_1 diterima ($0,008 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* pada tingkat signifikansi 5%. Artinya bahwa semakin banyak ukuran atau jumlah dari komisaris independen maka akan semakin rendah dalam penentuan tarif efektif pajak perusahaan. Terdapat kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi, dalam penentuan tarif pajak efektif perusahaan komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris diindikasikan tidak melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik dikarenakan pengetahuan dan latar belakang yang mendukung terhadap manajemen perusahaan yang mempengaruhi strategi perusahaan yang berhubungan dengan penentuan tarif pajak efektif perusahaan (Sabli dan Noor (2012).

Dalam rangka mendukung *corporate governance* yang baik, para pemegang saham dalam RUPS serta peraturan Bursa Efek Indonesia telah menetapkan jumlah dan prasyarat kepemilikan komisaris independen dalam sebuah perusahaan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia salah satunya juga perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap operasional perusahaan dalam menghasilkan laba. Salah satu cara meningkatkan laba bersih perusahaan adalah

dengan menekan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, salah satunya adalah biaya pajak. Hal tersebut dapat mendorong manajer untuk menekan pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan

Menurut Hanum dan Zulaikha (2013) proporsi komisaris independen yang lebih banyak tidak dapat memberikan jaminan bahwa suatu perusahaan pemerintah akan berjalan efektif dan sesuai dengan keinginan manajemen perusahaan begitu pula dalam penentuan tarif pajak efektif perusahaannya. Karena adanya permasalahan pengawasan kinerja serta kurang berperan aktifnya komisaris independen dalam perusahaan pemerintah maka dapat diindikasikan membuat semakin rendahnya penentuan tarif pajak efektif perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) dan Prakosa (2014), yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap upaya meminimalkan pajak yang dibayar perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya terhadap pengawasan dari kinerja manajemen, salah satunya dalam melakukan pengurangan pembayaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen.

Pengaruh Ukuran Komite audit Terhadap *Effective Tax Rate*

Untuk pengujian secara parsial diperoleh t hitung untuk variabel ukuran komite audit sebesar -1,310 dengan signifikansi 0,197 sehingga hipotesis H_2 ditolak ($0,197 > 0,05$). Ini menunjukkan bahwa penentuan tarif pajak efektif perusahaan BUMN tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dari jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan. Artinya komite audit kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan pajak terkait dengan besaran tarif pajak efektif perusahaan dan lebih condong menjalankan tugasnya berdasar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ukuran besar atau kecilnya jumlah dari komite audit pada perusahaan BUMN tidak menjamin bahwa perusahaan memiliki nilai *effective tax rate* yang baik serta tidak menjamin dapat melakukan intervensi dalam penentuan besaran *effective tax rate* perusahaan.

Komite audit adalah organ pendukung dalam *good corporate governance* yang memiliki tugas dalam membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM bagi perusahaan publik dan keputusan menteri BUMN bagi perusahaan BUMN, komite audit terdiri sedikitnya berjumlah 3 orang yang diketuai oleh seorang dewan komisaris independen perusahaan.

Dalam penelitian ini rata-rata perusahaan BUMN yang diteliti memiliki 3 atau 4 orang komite audit. Berarti sampel yang diambil dalam penelitian ini sudah mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM tentang jumlah dari komite audit. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan dari ketidakberadaannya pengaruh jumlah komite audit terhadap *effective tax rate* perusahaan. Dimungkinkan perusahaan hanya ingin mematuhi persyaratan yang pemerintah berikan tanpa mematuhi tugas dan fungsi dari komite audit sebenarnya atau dapat dikatakan hanya memenuhi syarat formalitas saja (Winarsih, 2014). Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit selaku organ dari perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan serta evaluasi kinerja perusahaan tidak berjalan dengan dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menunjukkan bahwa komite audit pada perusahaan BUMN cenderung melaksanakan tugasnya dengan netral dan tepat serta komite audit tidak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan mengenai pajak.

Pengaruh *Investor Institusional Terhadap Effective Tax Rate*

Untuk pengujian secara parsial diperoleh t hitung untuk variabel ukuran investor institusional sebesar -1,152 dengan signifikansi 0,255 sehingga hipotesis H_3 ditolak ($0,255 > 0,05$). Ini menunjukkan bahwa investor institusional terbukti secara statistik tidak signifikan terhadap *effective tax rate*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa investor institusional pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI kurang dapat mengontrol operasional perusahaan secara langsung sehingga kurang tercapainya kinerja perusahaan yang efektif terutama dalam hal penentuan kebijakan mengenai tarif pajak efektif perusahaan.

Investor institusional pada perusahaan BUMN lebih cenderung untuk memilih mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, karena pada BUMN pemerintah yang merupakan aparatur pajak yang menetapkan kebijakan serta peraturan pajak tentunya berusaha agar tetap mengalirkan kas ke negara semakin besar, salah satunya yaitu dengan tetap menginginkan pajak yang merupakan sumber pendapatan negara dapat tinggi serta tidak menginginkan perusahaan membayar pajak yang rendah (Handayani, 2013). Selain itu diindikasikan bahwa investor institusi tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi manajemen dalam perumusan kebijakan perusahaan, salah satunya adalah penentuan besaran pajak yang dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyebutkan bahwa secara statistik investor institusional terbukti tidak signifikan terhadap *effective tax rate*, dimana investor institusional tidak dapat menekan manajemen untuk menerapkan kegiatan perencanaan yang baik yang mengakibatkan *effective tax rate* perusahaan menjadi tidak baik.

Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal Terhadap *Effective Tax Rate*

Untuk pengujian secara parsial diperoleh t hitung untuk variabel kualitas auditor eksternal sebesar -1,383 dengan signifikansi 0,173 sehingga hipotesis H_1 ditolak ($0,173 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor eksternal (X_4) tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada tingkat signifikansi 5%. Artinya bahwa kualitas auditor eksternal yang diprosikan jika KAP tersebut termasuk anggota *big four* tidak memiliki pengaruh dalam penerapan pajak efektif perusahaan.

Penelitian Antonius (2009) menjelaskan bahwa kredibilitas dari suatu laporan keuangan eksternal menjadi permasalahan bagi sejumlah pemakai informasi keuangan yang dikarenakan kesalahan audit. Peran dari auditor *big four* seharusnya memberikan andil untuk menekan perusahaan melakukan pengurangan terhadap tarif pajak efektif perusahaan dibandingkan dengan auditor *non-big four*. Terdapat kemungkinan hal ini terjadi, kualitas audit yang pada dasarnya selaku fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh auditor eksternal tidak dapat dijalankan dengan baik (Herusetya, 2009). Contohnya pada kasus Enron pada tahun 2000 dimana KAP Arthur Andersen sebagai auditornya membenarkan kasus manipulasi atas laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hamed (2015) yang menyebutkan bahwa kualitas auditor eksternal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate*. Auditor dalam menjalankan profesinya dituntut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat atas kewajaran pelaporan keuangannya yang telah disajikan oleh manajemen.

Pengaruh Ukuran Perusahaan (*size*) Terhadap *Effective Tax Rate*

Untuk pengujian secara parsial diperoleh t hitung untuk variabel kontrol ukuran perusahaan sebesar -0,510 dengan signifikansi 0,613. Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada tingkat signifikansi 5%. Teori biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan yang besar lebih cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang besar lebih menjadi sorotan pemerintah. Namun berbeda dengan teori kekuasaan politik yang menyebutkan bahwa perusahaan besar lebih melakukan penghindaran pajak untuk mencapai penghematan atas beban pajaknya (Darmawan dan Sukartha, 2014: 156).

Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan bukan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tinggi serta rendahnya tarif pajak efektif perusahaan dikarenakan dalam penelitian ini rata-rata sampel memiliki besaran aset yang sama besar. Selain itu, penelitian ini tidak didukung oleh kedua teori tersebut dimana ukuran dari perusahaan mempengaruhi beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian ini mendukung penelitian dari Soepriyanto (2011), bahwa *size* bukan merupakan faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan karena ukuran total aset pada perusahaan sampel rata-rata sama besar.

Pengaruh Leverage Terhadap *Effective Tax Rate*

Untuk pengujian secara parsial diperoleh t hitung untuk variabel kontrol *leverage* perusahaan sebesar 1,445 dengan signifikansi 0,155. Ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada tingkat signifikansi 5%. Secara logika, bahwa semakin tinggi nilai dari utang perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan, maka akan semakin tinggi biaya bunga yang harus dibayar perusahaan sehingga akan mempengaruhi tarif pajak efektifnya karena beban bunga yang dihasilkan dari utang merupakan faktor pengurang dalam pajak. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian ini yang mengindikasikan bahwa selama periode pengamatan perusahaan pemerintah ini tidak memanfaatkan utangnya untuk mempengaruhi besaran pajak yang dibayar perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate* perusahaan.

Pengaruh Return On Assets (ROA) Terhadap *Effective Tax Rate*

Untuk pengujian secara parsial diperoleh t hitung untuk variabel kontrol ROA perusahaan sebesar -0,002 dengan signifikansi 0,999. Ini menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ROA yang merupakan salah satu indikator untuk menilai pencapaian laba perusahaan tidak dapat mempengaruhi penentuan tarif pajak efektif perusahaan.

Profitabilitas sebuah perusahaan merupakan salah satu indikator untuk memperlihatkan bagaimana baiknya keuangan suatu perusahaan. Dalam hal ini profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menaati pembayaran pajak, sebaliknya bagi perusahaan dengan *profitabilitas* yang rendah akan tidak taat dalam membayar pajak karena lebih memilih mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajaknya (Fikriyah, 2013).

Berdasarkan data yang digunakan selama periode pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan BUMN dalam menghasilkan labanya lebih cenderung untuk membayarkan pajaknya berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyebutkan bahwa *return on assets* tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. *Return on assets* merupakan faktor penting dalam penentuan besaran tarif pajak efektif, namun dalam pengamatannya ROA tidak dapat mempengaruhi besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Pengaruh Capital Intensity Ratio (CIR) Terhadap Effective Tax Rate

Untuk pengujian secara parsial diperoleh t hitung untuk variabel kontrol CIR sebesar -0,922 dengan signifikansi 0,361. Ini menunjukkan bahwa CIR tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut artinya bahwa rasio intensitas modal pada perusahaan BUMN tidak mempengaruhi besaran atau kenaikan dari *effective tax rate* perusahaan. Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa pada perusahaan BUMN kebanyakan menginvestasikan modalnya pada persediaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menjelaskan bahwa investasi perusahaan yang digunakan pada aset tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh struktur *corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit dan investor institusional serta kualitas auditor eksternal terhadap *effective tax rate* (ETR) perusahaan BUMN, dan hasilnya menunjukkan bahwa:

1. Ukuran komisaris independen (X1) berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* perusahaan.
2. Ukuran komite audit (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* perusahaan.
3. Ukuran *investor* institusional (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* perusahaan.
4. Kualitas auditor eksternal (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* perusahaan.

KETERBATASAN

Dalam penelitian ini rentang waktu penelitian yang terlalu pendek dengan jumlah pengamatan yang terbatas periode tahun 2010-2014 yaitu dengan sampel perusahaan BUMN yang telah terdaftar di BEI yang mengakibatkan tingkat *varians* yang terbatas. Serta pengukuran untuk struktur *corporate governance* pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu komisaris independen, komite audit dan *investor* institusional.

IMPLIKASI

Implikasi dalam penelitian ini yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pemilik utama dalam BUMN, diharapkan agar lebih memperkuat pengawasan perpajakan perusahaan.
2. Diharapkan manajemen perusahaan harus berusaha menerapkan dan memperbaiki kualitas *corporate governance* yang baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan rentang waktu yang lebih lama serta menambah variabel atau indikator yang lain dalam mengukur struktur *corporate governance* seperti ukuran dewan direksi, kompensasi direksi,

kepemilikan manajerial dan lain sebagainya. Selain itu karena isu *corporate governance* merupakan isu global yang telah menjadi pembahasan diberbagai kalangan, maka disarankan bahwa pengukuran terhadap *corporate governance* yang lebih objektif dan tidak berdasarkan pada sudut pandang manajemen saja sehingga lebih memberikan dampak yang adil bagi *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- _____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*. Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- _____, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- _____, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: Kep-205/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- _____, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- _____, Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 1 Tentang Penerapan Praktik *Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing*. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Andriyani, N. K. 2008. Pengaruh *Investment Opportunity Set (IOS)*, Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Leverage pada Kualitas Laba. *Skripsi*. Denpasar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Indonesia.
- Ashari, Ruslan. 2011. Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. *Skripsi*. Makasar. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Boussaidi, A, dan M, S, Hamed. 2015. The Impact Of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Asian Economic and Social Society Journal* 5(1): 2225-4226.
- Darmawan, IG Hendy. dan I, M, Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9(1): 143-161.
- Ghazali, Imam. 2006. *Statistik Nonparametrik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2003. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handayani, Desi. 2013. Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan* 6 (12): 26-35.

- Hanum, H, R dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Jurnal Of Accounting* 2(2): 1-10.
- Hasanah, F., H. Yanto, dan B. D. Handayani. 2014. Model Pengembangan *Good Corporate Governance* dan Sustainability Report pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram. Universitas Mataram. Lombok.*
- Herusetya, Antonius. 2009. Efektifitas Pelaksanaan Corporate Governance dan Audit Eksternal-Auditor dengan Spesialisasi Industri dalam Menghambat Manajemen Laba. *JAAI* 13(2): 167-188.
- Ikhsan, Arfan, dan Herkulanus Bambang Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jensen, M, C, dan W, H, Meckling. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Koanantachai, R. 2013. Tax Aggressiveness, Corporate Governance and Firm Value: An Empirical Evidence From Thailand. *Tesis. Master Of Science Program in Finance. Thammasat University. Bangkok. Thailand.*
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*. 31, 86-108.
- Pohan, H, T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik* 4(2): 113-135.
- Prakosa, K,B. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya. Universitas Mataram: 1-27.*
- Rozania, R, Anggraini. dan M, Nindito. 2013. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Pergantian Auditor, dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVI. Universitas Brawijaya: 3480-3912.*
- Santoso, Singgih. 2002. *Statistik dengan SPSS*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Sari, D, K, dan Dewi Martani. 2010. Karakteristik Kepemilikan perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto: 1-34.*
- Sari, G, M. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Padang.*
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Edisi Revisi. Bagian Pertama. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soepriyanto, G. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Binus Business Riview* 2(2): 1025-1035.
- Sugiyono. 2012. *Metoda Penelitian*. Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Supangkat, Harry. 2005. *Buku Panduan Direktorat Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

- Suyanto dan Supramono. 2010. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16 (02): 167-177.
- Tuanakotta, M. Theodorus. 2011. *Berpikir Kritis Dalam Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi, D. 2009. Pengaruh Good Corporate Govenance dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Avoidance. *RPSEP*.